

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Perilaku politik merupakan sebuah teori yang dalam penggunaannya melibatkan teori pendukung lainnya. Karena itu juga, peneliti melibatkan teori pendukung lain yaitu teori budaya politik Gabriel Almond dan Sidney Verba.¹³ Peneliti juga membahas mengenai definisi budaya politik, orientasi dan bentuk-bentuknya.

1. Perilaku Politik

Perilaku politik sebagai salah satu kajian dalam ilmu sosiologi politik, di Indonesia kajian ini menjadi ramai diperbincangkan sejak sistem politik Indonesia beralih ke sistem demokrasi langsung, mengingat gaya dan jenis karakter para aktor politik sangat bervariasi, dalam hal ini perilaku politik dapat dipahami dari berbagai sumber.

Menurut Sudijono Sastroatmodjo, perilaku politik adalah “tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut. Perilaku politik ini diarahkan pada pencapaian konsensus atau kesepakatan dalam mewujudkan tujuan dari masyarakat dan pemerintah”.

Perilaku politik dapat dijelaskan sebagai hubungan antara pemerintah dengan publik, antar lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara suatu kelompok dan individu dalam masyarakat terkait proses pembuatan, penerapan, serta penegakan dalam keputusan-keputusan politik yang menggambarkan perilaku politik. Secara universal perilaku politik bisa dimaksud sebagai hasil pemikiran ataupun tindakan manusia yang berkenaan dengan proses-proses pemerintahan.

Ramlan Surbakti memiliki pandangan yang sejalan mengenai makna perilaku politik. Surbakti merumuskan perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, dimana yang melakukan kegiatannya adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan tersebut terbagi dua,

¹³ GABRIEL ALMOND and SIDNEY VERBA, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Princeton University Press, 1963).

yaitu fungsi pemerintahan yang dipegang pemerintah dan fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.¹⁴

Perilaku politik meliputi asumsi internal seperti persepsi, aktivitas, orientasi serta kepercayaan dan tindakan-tindakan nyata misalnya pemberian suara, kritik, lobbying, dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai penjelasan, data dari suatu hal, ataupun cerminan tentang obyek maupun suasana politik dengan metode tertentu. Sebaliknya perilaku politik yakni menggambarkan ikatan ataupun pertalian antara kepercayaan yang sudah menempel serta mendesak seseorang agar dapat menjawab sebuah objek ataupun kondisi politik dengan metode tertentu.¹⁵

Perilaku politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh proses dan kejadian bersejarah masa lampau yang merupakan kesinambungan bersifat dinamis. Kejadian ataupun peristiwa politik secara umum maupun yang berkaitan dengan individu ataupun kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan sistem politik ataupun ketidakstabilan politik, janji-janji politik dari calon yang berebut kekuasaan yang tidak pernah ditepati juga bisa mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Ada pula yang dimaksud dengan perilaku politik, misalnya:¹⁶

- a. Melaksanakan pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat atau pemimpin.
- b. Berhak serta mempunyai wewenang untuk menjajaki suatu organisasi masyarakat, (LSM) lembaga swadaya masyarakat, ataupun partai politik.
- c. Turut aktif dalam partisipasi politik.
- d. Menyatakan pendapat atau mengkritik para pelaksana politik yang berotoritas.
- e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik.
- f. Melaksanakan kewajiban serta haknya selaku pelaku politik dalam melaksanakan perilaku politik yang sudah disusun secara baik oleh undang-undang dan perundangan hukum yang telah dibuat.

Ramlan Surbakti menjelaskan dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik” bahwa perilaku politik ialah suatu aktivitas maupun kegiatan yang berkaitan langsung, dan juga berhubungan langsung

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Grasindo, 1992).

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

¹⁶ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

dengan proses-proses politik, baik dalam hal pembuatan keputusan politik hingga pada penerapan kegiatan politik secara bertahap.

Terdapat dua variabel yang mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam partisipasi politiknya ialah pemahaman dan keyakinan terhadap faktor politik yang sedang terjadi. Variabel tersebut beririsan meliputi aspek status ekonomi, status sosial, dan afiliasi politik, serta pengalaman individu. Pemahaman merupakan bentuk tindakan akan perbuatan (kondisi yang sesungguhnya) yang dimiliki oleh manusia yakni sebagai wujud unik, yang mana ia bisa menyesuaikan diri berdasarkan apa yang ia yakini.¹⁷

Keyakinan merupakan ungkapan pemahaman, dimana ia bisa membagikan ataupun bertahan pada suasana serta keadaan tertentu dalam suatu lingkungan. Pemahaman disini menerangkan kalau seorang aktor politik dengan sadar dirinya mempunyai kemahiran politik untuk pemenuhan haknya. Usaha seorang calon kandidat untuk mencapai kemenangan dan menjadi pemimpin wajib diiringi oleh sokongan serta keyakinan masyarakat. Maka dari itu, salah satu kunci utama tiap kandidat untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan adalah keyakinan. Keyakinan masyarakat tercipta karena status serta orientasi politik yang dimiliki oleh para calon kandidat. Misalnya status sosial yang dimiliki oleh salah satu calon kandidat atau status kebangsawannya sehingga masyarakat yakin akan kemampuannya.

2. Perilaku Politik Pemilih

Popkin dalam Nursal (2004) membedakan antara pilihan politik sebagai wujud perilaku politik dengan pilihan pribadi terhadap produk-produk konsumtif sebagaimana dalam perilaku ekonomi. Menurutnya ada empat hal yang membedakan perilaku tersebut. *Pertama*, memilih kandidat politik, secara tidak langsung dirasakan manfaatnya sebagaimana pilihan terhadap produk konsumtif, melainkan manfaatnya diperoleh di masa depan. *Kedua*, pilihan politik ialah tindakan kolektif dimana kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Jadi pilihan seseorang senantiasa mempertimbangkan pilihan orang lain. *Ketiga*, pilihan politik senantiasa diperhadapkan dengan ketidakpastian utamanya untuk memenuhi janji politiknya. *Keempat*, pilihan politik membutuhkan informasi yang intensif demi tercapainya manfaat di masa depan.

¹⁷ Arya Hadi Dharmawan, 'Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif Dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan Dan Ekologi Politik', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1.2 (2007).

Kemudian James S. Coleman berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dari berbagai varian stimulus politik yang menjadi motivasi pemilih menentukan pilihannya, ternyata dapat disatukan oleh visi misi pemilih itu sendiri. Faktor atau variabel yang dapat dijadikan sebagai kategorisasi pemilih pada pola yang sama adalah masalah waktu pencapaian tujuan. Stimulus politik tidak secara langsung mempengaruhi perilaku politik melainkan terlebih dahulu melewati atau melalui variabel antara yakni visi misi pemilih yang menjadi pertimbangan utama dalam mencapai tujuan politiknya yang dalam penelitian ini disebut sebagai rasionalitas diakronik.

Sintesa teoritis yang didasarkan pada realitas locus penelitian menurut James S. Coleman menunjukkan bahwa, perilaku politik pemilih mencirikan model diakronik, yaitu rasionalitas perilaku pemilih dengan mempertimbangkan jangka waktu pencapaian tujuan. Derajat rasionalitas tersebut tersusun dalam tiga rentang waktu, yakni rasionalitas retrospektif, rasionalitas pragmatis-adaptif, dan rasionalitas prospektif.

a. Model rasional retrospektif

Yaitu kemampuan pemilih untuk memilih berdasarkan penilaiannya pada penampilan kontestan pada masa yang lalu. Perilaku memilih retrospektif (*retro*, *spektif*, *voting*) tidak ubahnya seperti memberikan ganjaran atau hukuman kepada kontestan. Rasionalitas retrospektif diarahkan pada figur dan partai politik. Dalam artian, *reward* maupun *punishment* diarahkan pada kandidat, parpol mengusung, dan juru kampanye.

b. Model rasionalitas pragmatis-adaptif

Tipe rasionalitas ini didasarkan atau disesuaikan pada stimulus politik yang muncul pada momen pemilihan. Perilaku pragmatisme-adaptif muncul akibat pesimisme masa depan dan janji kampanye yang sekadar “isapan jempol” akhirnya mendorong pemilih menjadi pragmatis (*pragmatic voting*). Belum lagi adanya anggapan siapapun yang berkuasa tidak akan mampu melakukan perubahan signifikan. Rasionalitas model ini tidak mengikuti tradisi model prospektif (masa depan) dan tidak pula didasarkan pada model retrospektif (pandangan masa lalu). Melainkan sifatnya fleksibel dan kondisional. Atau dengan kata lain model pragmatis-adaptif, yaitu perilaku pemilih yang diorientasikan pada waktu sekarang, pemilih hanya semata melihat kepentingan sesaat.

c. Model rasionalitas prospektif

Model rasionalitas yang dimaksud adalah perilaku pemilih yang didasarkan pada orientasi masa depan yang lebih panjang (prospective voting). Perilaku pemilih dalam model prospektif dalam menentukan pilihannya didasarkan pada visi misi kandidat, rekam jejak kandidat (track record), integritas, keahlian, dan program yang ditawarkan. Motivasi utama atau tujuan yang ingin dicapai oleh pemilih dari pemberian suaranya pada salah satu pasangan calon yaitu menginginkan pemimpin yang benar-benar dengan dianggap kapabel dalam menjalankan roda pemerintahan yang *good governance* and *clean governance*. Rasionalitas perilaku pemilih paling tinggi berdasarkan semangat dan makna Pemilihan Umum. Dimana pemilih tipe ini adalah pemilih yang aktif mengakses dan mencari informasi-informasi tentang apa yang akan dilakukannya.

Perilaku pemilih ialah tingkah laku seorang dalam memastikan pilihannya yang dirasa sangat disukai ataupun sangat sesuai. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan ke dalam dua pandangan ialah; *Mazhab Colombia* serta *Mazhab Michigan*. *Mazhab Colombia* menekankan pada aspek sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam memastikan pilihan di pemilu. Model ini memandang masyarakat selaku satu kesatuan kelompok secara vertikal dari tingkatan yang terbawah sampai yang paling atas. Pemeluk pendekatan ini yakin bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang bersumber atas pengelompokan sosiologis semacam agama, kelas (status sosial), pekerjaan, usia, jenis kelamin mempunyai peranan yang penting dalam memastikan pola pembentukan perilaku memilih.¹⁸ Oleh sebab itu preferensi terhadap pilihan suatu partai politik ialah suatu produk dari ciri sosial orang yang bersangkutan. *Mazhab Michigan* menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat tergantung pada sosialisasi politik di suatu daerah yang menyangkut diri pemilih itu sendiri.¹⁹

Menurut Dennis Kavanagh (dalam Mukti Sitompul, 2004), faktor perilaku politik pemilih bisa dianalisis dengan 5 (lima) pendekatan ialah:

a. Pendekatan Struktural

¹⁸ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas* (Yayasan Obor Indonesia, 2008).

¹⁹ Indra Richard Rompas, 'Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Desa Bongkudai Selatan Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongodow Timur', *Jurnal Politic*, 9.1 (2020), 1–22.

Pendekatan struktural memandang aktivitas pemilih pada saat memilih suatu partai politik sebagai produk dari konteks struktural yang luas, seperti struktur sosial masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat, sistem kepartaian, sistem pemilu, serta program yang ditonjolkan partai-partai partisipan pemilu. Terkait model ini, tingkah laku politik seseorang ternilai dari penentuan pilihan yang ditetapkan mulai dari pengelompokan sosial, agama, bahasa, serta etnis atau suku. Jika kita amati dari sisi pendekatan ini, para pemilih akan memastikan pilihannya bersumber pada pertimbangan subsistem pada uraian sebelumnya serta akan mempertimbangkan seluruh sesuatu yang akan merubah pemikiran mereka dalam memastikan pilihannya.²⁰

b. Pendekatan Sosiologis atau Sosial Struktural

Pendekatan sosiologi cenderung melihat aktivitas memilih yang erat kaitannya dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar balik demografi serta kondisi sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota maupun desa), pekerjaan, pembelajaran, kelas, pemasukan ataupun agama.

Terdapatnya ikatan antara predisposisi sosial ekonomi pemilih serta keluarga erat kaitannya dengan perilaku pemilih. Baginya, predisposisi sosial ekonomi pemilih serta keluarga pemilih memiliki ikatan yang signifikan dengan perilaku pemilih. Misalnya preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik pilihan seorang ayah ataupun preferensi pilihan ibunya akan mempengaruhi pada preferensi politik seorang anak. Predisposisi sosial ekonomi juga dapat berbentuk agama yang dianut, kelas sosial, tempat tinggal, ciri demografis dan sebagainya.²¹

c. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologi merupakan sesuatu metodologi untuk mendekati, menelaah, serta menganalisis suatu indikasi sosial ataupun permasalahan dengan mempraktikkan konsep serta prinsip ekologi. Pendekatan ini menggunakan lingkungan sebagai target utama dalam memandang perilaku pemilih dalam memastikan pilihannya. Manusia dalam hal ini tidak boleh dimaksudkan sebagai makhluk biologis semata yang setara dengan makhluk hidup yang lain, tetapi merupakan wujud

²⁰ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.

²¹ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.

sempurna yang dikaruniai energi cipta, rasa, karsa, ataupun makhluk yang berbudi luhur.

Pendekatan ekologi ini ditekankan pada keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan variabel area yang ada. Pendekatan kelingkungan dalam kerangka analisisnya tidak mengaitkan ikatan antara makhluk hidup dengan wilayah alam saja, namun wajib pula berhubungan dengan satu fenomena yang didalamnya terdapat fenomena alam beserta tingkah laku manusia didalamnya. Perilaku manusia yang meliputi pertumbuhan ide-ide serta nilai-nilai geografis dan pemahaman akan lingkungan. Penggambaran sistematika Kirk ditunjukkan bahwa ruang lingkup lingkungan geografi mempunyai dua aspek, ialah area perilaku (*behavior environment*) serta fenomena lingkungan (*phenomena environment*).²²

Pendekatan ekologis relevan apabila dalam wilayah pemilihan ada perbandingan ciri pemilih yang didasarkan pada unit teritorial. Kelompok masyarakat pemeluk agama, buruh, kelas menengah, suku bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di wilayah tertentu bisa mempengaruhi pergantian komposisi pemilih terhadap pergantian pilihan mereka.

d. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologi sosial menerangkan bahwa tingkah laku pemilih sangat dipengaruhi oleh interaksi antara aspek internal serta eksternal orang di lingkungan bermasyarakat. Pendekatan psikologi sosial pula dapat menerangkan tentang perilaku (*attitude*), harapan (*expectation*) masyarakat yang bisa melahirkan aksi dan tingkah laku yang berpegangan teguh pada tuntutan sosial (*conformity*).

Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menggambarkan perilaku dalam memilih pada pemilihan umum ialah berbentuk identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada anggapan pemilih ataupun partai-partai yang terdapat keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Pendekatan psikologi lebih menitikberatkan konsep sosialisasi serta perilaku selaku variabel utama dalam menggambarkan perilaku memilih, daripada pengelompokan sosial. Bagi pendekatan ini, para pemilih memastikan pilihannya terhadap seorang kandidat disebabkan pengaruh kekuatan psikologis yang

²² Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.

tumbuh dalam dirinya selaku produk dari sosialisasi yang mereka terima.²³

e. Pendekatan Rasional

Perspektif pendekatan rasional, pemilih hendak memilih bila ia merasa terdapat timbal balik yang hendak diterimanya. Jika pemilih tidak memperoleh manfaat dengan pilihan kandidat yang sedang mencalonkan diri, ia tidak akan menjajaki serta melaksanakan pilihannya pada proses pemilu. Pendekatan ini memandang terdapatnya untung rugi dalam memandang perilaku pemilih. Hal yang dilihat tidaklah ongkos memilih, melainkan suara yang terkumpul bisa mempengaruhi hasilnya.²⁴ Hal ini kerap kali dijalankan oleh mereka yang mencalonkan diri dalam pemilu. Aspek pemahaman pemilih sangat mempengaruhi dalam pendekatan ini, dan juga sering memandang bersumber pada anggapan sederhana, ialah tiap orang akan senantiasa mengutamakan *self-interest*.²⁵

Pemilih dalam memastikan pilihan politiknya tentunya dipengaruhi oleh berbagai aspek. *Pertama*, kita wajib menguasai tentang konteks latar belakang sejarahnya. Perilaku pemilih dalam memastikan opsi politiknya banyak dipengaruhi oleh proses serta sejarah masa lampau. Ini disebabkan budaya politik di Indonesia masih kental akan sejarah serta kebudayaan masa dulu sekali; *Kedua*, keadaan geografis serta daerah. Hal ini sangat mempengaruhi kepada masyarakat dalam memastikan opsi politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak dipengaruhi oleh aspek daerah. Terkait sebab itu, keadaan serta aspek geografis atau daerah jadi pertimbangan khusus dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan, serta kebijakan hingga dalam pemilihan umum. Upaya tersebut menuntut supaya sang calon pandai-pandai membuat strategi dalam kampanye supaya pemilih cenderung memilih sang kandidat tersebut; *Ketiga*, merupakan pilihan rasional, yang dimana pemilih dalam memastikan pilihannya senantiasa bersumber pada pertimbangan untung ruginya.

²³ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.

²⁴ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.

²⁵ Moh. Fajar Shodiq Ramadhan and Tri Hendra Wahyudi, 'Pembiaran Pada Potensi Konflik Dan Kontestasi Semu Pemilu Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1.2 (2016), 136 <<https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6581>>.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada uraian tadinya dipersempit ataupun diperkecil menjadi tiga pendekatan ialah pendekatan sosiologi, pendekatan psikologis, serta pendekatan rasional. Pendekatan sosiologi sendiri lebih menekankan akan pentingnya sebagian hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan seorang, semacam status sosial ekonomi yang terdiri dari pembelajaran, jenis pekerjaan, pemasukan serta kelas sosial.

Pendekatan sosiologis pula memandang yang berkaitan dengan hal agama, etnik, daerah tempat tinggal, serta domisili. Tetapi juga pendekatan daerah tempat tinggal kerap dikombinasikan dengan pendekatan psikologis emosional, sebagai contohnya terdapat seorang calon pemimpin yang diketahui baik oleh masyarakat dekat tempat tinggalnya. Kemungkinan besar para pemilih hendak memakai pendekatan sosiologis serta psikologis sehingga memilih calon bupati dan wakil bupati karena pemilih sudah memahami wujud tersebut serta mengabaikan pertimbangan yang lain yang mungkin timbul setelah pemilihan berakhir.

Pendekatan psikologis sendiri sangat tergantung dengan sosialisasi politik area tempat pemilih berdomisili. Sosialisasi politik yang tumbuh akan memusatkan kecenderungan emosional pemilih dalam memastikan pilihan politiknya. Seluruh hal tersebut biasanya ialah kegiatan-kegiatan kampanye yang memunculkan pencitraan politik terhadap kandidat. Terkait konteks pendekatan rasional, pada saat seorang pemilih merasa tidak menemukan manfaat dengan memilih salah satu partai ataupun kandidat calon pemimpin dalam pemilihan, ia tidak akan memberikan pilihannya dan permasalahan ini berlaku pula untuk pemilih yang tidak ingin diketahui ataupun pemilih apatis. Mengenai gambaran ketiga pendekatan tersebut, telah terdapat pada sub bab sebelumnya.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat suatu nilai yang berlaku secara menyeluruh, tapi terdapat pula nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu, dan itu biasanya tidak berlaku bagi kelompok masyarakat lain. Seperti halnya pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya tentang perilaku memilih, itu bersumber dari penelitian yang diadakan di negara-negara maju, pemilu yang berulang-ulang dan praktek demokrasi yang relatif bersih, memungkinkan teori itu memiliki validitas tinggi untuk memprediksi perilaku pemilih untuk pemilu-pemilu berikutnya.

Untuk konteks Indonesia, terdapat perbedaan antara masa orde baru dan pasca orde baru, seperti iklim sosial politik yang berbeda antara kedua masa tersebut. Tapi bukan berarti hasil kajian

pada masa sebelumnya sama sekali tidak bisa digunakan, mengingat hasil penelitian pada masa reformasi masih sangat terbatas.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik menurut Ramlan Surbakti adalah:

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, ekonomi, sistem kebudayaan media massa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian masyarakat seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.
- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- d. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi masyarakat secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

Dari lingkungan sosial politik langsung masyarakat mengalami sosialisasi langsung dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Dimana faktor lingkungan sosial politik yang berupa sosialisasi internalisasi dan politisasi, selain itu faktor lingkungan sosial politik tak langsung juga mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung berupa situasi. Faktor lingkungan sosial berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian atau sikap perilaku pemilih.

3. Perilaku Politik dalam Pandangan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama disini memiliki pandangan luas terkait perilaku politik warga Nahdlatul Ulama (nahdliyin). NU berpendirian bahwa paham ahlussunnah waljama'ah harus diterapkan dalam tatanan kehidupan nyata di masyarakat dengan serangkaian sikap yang bertumpu pada karakter *tawassuth* dan *i'tidal*. Pendekatan perilaku politik juga mengalami perluasan makna, dari interaksi antara masyarakat dengan lembaga pemerintah, antar lembaga pemerintahan, dan diantara individu dengan suatu kelompok dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi pola interaksi antara lembaga non pemerintah dengan masyarakat. Terkait hal tersebut, hipotesa awal peneliti ialah bahwa pendekatan ini mengalami perluasan makna dan dapat digunakan guna memenangkan suatu pasangan calon di pemilihan kepala daerah dan masyarakat cenderung mengarah kepada perilaku politik yang bersifat *heterogen*.

Perilaku politik warga Nahdlatul Ulama juga merupakan implikasi dari budaya politik Nahdlatul Ulama berupa tradisi-tradisi, upacara keagamaan, dan afiliasi politik para elit. Sebagaimana disebutkan dalam naskah *khittah* NU yang secara garis besar, pendekatan perilaku kemasyarakatan NU dapat dikategorikan menjadi tiga bagian:²⁶

- a. *Tawassuth* dan *I'tidal*, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan *tatharruf* (ekstrim).
- b. *Tasamuh*, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat.
- c. *Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah SWT.

Banyak orang yang mempertentangkan antara budaya (budaya politik) dengan agama. Hal ini karena agama berasal dari Tuhan yang bersifat sakral (*ukhrawi*), sedang budaya adalah kreasi manusia yang bersifat *profane* (duniawi). Akan tetapi sejak diturunkan, agama tidak bisa dilepaskan dari budaya sebagai perangkat untuk mengekspresikannya. *Ahlussunnah Wal Jama'ah* sebagai paham keagamaan yang bersifat moderat memandang dan memperlakukan budaya secara proporsional (wajar). Sebagai kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, budaya tentu memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial. Terkait hal ini, berlaku kaidah “*al-muhafadzatu ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bil jadidil al-ashlah*”, yaitu melestarikan kebaikan yang ada dan mengambil atau mengkreasi sesuatu yang baru yang lebih baik. Penggunaan kaidah ini, sejalan dengan *nahdliyin* yang memiliki pegangan dalam menyikapi tradisi. Dalam hal ini yang dilihat bukan tradisi atau budayanya, tapi nilai yang dikandungnya. Jika sebuah produk budaya tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, dalam arti mengandung kebaikan, maka bisa diterima. Bahkan bisa dipertahankan sebagai yang layak untuk diikuti. Ini sebagaimana kaidah *fiqh*, “*al-adah muhakkamah*”, bahwa budaya atau tradisi (yang baik) bisa menjadi pertimbangan hukum.²⁷

Al-qur'an dan Hadits tentang perilaku politik berkenaan dengan praktik-praktik pengaturan ketatanegaraan yang dilakukan

²⁶ YUSUF, *Menggugat Khittah NU*.

²⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005).

Nabi saw atau para sahabat ketika berinteraksi dengan Nabi dan umat Islam. Dalam Al-qur'an dan Hadits terdapat sejumlah pesan yang berkenaan dengan usaha memperoleh kedudukan atau jabatan dan hal-hal yang mengatur ketatanegaraan, di antaranya:

Ketika berkampanye jangan hanya sekedar pemoles citra dan pemanis bibir saja, janganlah jualan anti korupsi bila partai tersebut masih menjadi rumah yang nyaman bagi para koruptor, atau mengklaim suara rakyat. Padahal rakyat tidak pernah merasa terwakili, atau membuat iklan-iklan dan janji-janji yang bombastis, yang sebetulnya tidak sanggup diwujudkan. Seorang juru kampanye, perlu berhati-hati jangan asal mengumbar janji, jangan sampai dia sendiri tidak sanggup memikulnya. Apalagi lebih berbahaya, jika ia sama sekali tidak berniat menjalankan janjinya. Amanah merupakan salah satu sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena ia mengemban tanggung jawab yang begitu besar. Allah SWT berfirman dalam QS. 17 al-Isra': 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Sementara Hadits tentang kandidat yang layak untuk dipilih.

عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أنتم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

Artinya: Dari ‘Auf bin Malik dari Rasulullah saw. bersabda: “Sebaik-baik pemimpin (wakil) yang kamu pilih adalah : yang kalian cintai (suka) mereka dan mereka mencintai kalian, yang kalian doakan mereka dan mereka mendoakan kalian; dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, yang kalian kutuk dan mereka mengutuk kalian”.

4. Budaya Politik

Perilaku manusia dalam bermasyarakat merupakan suatu tindakan dalam proses politik dan dipengaruhi oleh pola orientasi yang ada serta proses belajar yang dirasakan oleh seseorang dalam masyarakat. Demikian pula untuk menjelaskan konsep perilaku politik wajib juga berlandaskan kebudayaan politik masyarakatnya.

Kaitan antara perilaku dan budaya politik, budaya politik dimana kecenderungan berperilaku individu terhadap sistem politik yang berlaku di negaranya. Dalam pendekatan budaya politik,

individu merupakan subyek kajian yang utama dan bersifat empiris, dalam arti pendapat orang per oranglah yang membangun kesimpulan penelitian. Ini berbeda dengan pendekatan filsafat politik, misalnya, yang lebih bersifat abstrak oleh sebab pendapat dibangun oleh seseorang tanpa terlebih dahulu melihat fakta lapangan, atau paling tidak, melalui serangkaian penelitian yang melibatkan orang banyak. Dengan demikian pendekatan budaya politik adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik.

Salah satu bentuk budaya politik yaitu cerminan pola ikatan yang terjalin antar orang (anggota kelompok) yang satu dengan yang lain, antar orang dengan kelompoknya, serta antar kelompok dengan kelompok. Pola ikatan dalam sistem politik masyarakat tertentu itu dinamakan budaya politik (*political culture*).²⁸ Budaya politik diartikan sebagai pola tingkah laku orang serta orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota dalam suatu sistem politik. Sebutan budaya politik tentu inheren (terikat) pada tiap masyarakat, yang terdiri dari beberapa orang yang hidup baik dalam sistem politik tradisional ataupun modern.

Bagi Almond dan Verba budaya politik merupakan teori tentang bagaimana seseorang mempunyai orientasi, perilaku, serta nilai-nilai politik yang tercermin dalam perilaku politiknya. Penafsiran budaya politik merujuk pada orientasi yang khas suatu warga negara terhadap sistem politik dan hal lain semacamnya serta perilaku terhadap peranan warga negara di dalam sistem tersebut.²⁹

Lebih lanjut lagi, masyarakat tetap mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol, lembaga-lembaga kenegaraan, perilaku tokoh-tokoh politik, keputusan para pembuat kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik, dan juga tentang bagaimana sepatutnya ia berfungsi dalam sistem politik. Dari sinilah akan bisa dilihat pola orientasi dari masing-masing warga negara terhadap sistem politik sebagai dasar dalam penentuan klasifikasi jenis kebudayaan politik.

Orientasi warga negara tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, serta evaluatif yang diperuntukan kepada sistem politik secara umum, aspek input serta output, dan beberapa individu

²⁸ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999).

²⁹ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi Di Lima Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

sebagai aktor politik. Orientasi kognitif warga negara merujuk kepada pengetahuan serta keyakinan atas politik, peranan, kewajibannya, dan input serta outputnya. Orientasi ini lebih merujuk kepada sejauh mana uraian seseorang terhadap sistem politik ataupun perilaku para aktor politik, kebijakan yang diambil oleh tokoh politik, dan implikasinya terhadap kepentingan dirinya.

Sebaliknya orientasi afektif menggambarkan tentang bagaimana perasaan seseorang terhadap sistem politik, peranan para aktor politik, serta penampilan para aktor politik. Dilihat dari aspek ini, seseorang dimungkinkan untuk mempunyai perasaan subjektif tertentu terhadap bermacam aspek dari opsi politik yang ada, sehingga ia bisa menerima maupun menolak opsi politik itu pada bagian tertentu ataupun sistem politik secara totalitas.

Orientasi evaluatif merujuk pada putusan serta komentar warga negara tentang politik yang bersumber pada apa yang ia tahu dan ia rasakan terhadap kondisi politik ataupun perilaku aktor-aktor politiknya. Keputusan dan kritik seseorang mengenai perilaku politik ini ditetapkan oleh kemampuannya dalam memperhitungkan moralitas politik, pengetahuan, dan cara-cara mereka dalam menuntut evaluasi politik dalam memberikan kritik.

Gabriel Almond dan Sidney Verba membagi budaya politik dalam tiga jenis. *Pertama*, budaya politik parokial ialah tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang diakibatkan aspek kognitif (misalnya tingkatan pembelajaran relatif rendah); *Kedua*, budaya politik kaula ialah masyarakat yang bersangkutan telah relatif maju namun masih berlaku pasif; *Ketiga*, budaya politik partisipan ialah budaya politik yang disyarati dengan pemahaman politik sangat besar dan masyarakatnya aktif dalam setiap proses politik.³⁰

5. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung dimulai sesudah dijalankannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sekaligus ialah langkah awal untuk proses demokratisasi dalam lingkup kewilayahan atau lokal di Indonesia. Sistem demokrasi tersebut dijalankan dan menyebar sebagai akibat dari adanya otonomi daerah, hal tersebut tercantum melalui pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat memacu tumbuhnya demokrasi di daerah-daerah. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan akan lahirnya aktor-aktor demokrasi di daerah, yang setelah itu diharapkan sanggup melaksanakan inovasi-inovasi baru untuk transformasi daerah.

³⁰ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*.

Transformasi mekanisme pemilihan umum dari sistem perwakilan ke sistem pemilihan langsung ialah suatu kemajuan signifikan untuk pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang tengah menempuh masa transisi demokrasi ini. Pergantian tersebut sudah sepatutnya diiringi oleh pergantian yang sama pada sistem politik lokal. Pemilihan kepala daerah ialah momen politik yang sudah diadakan serentak semenjak bulan juni 2005 sebagai akses dari pemilihan wakil rakyat untuk duduk di lembaga eksekutif dan legislatif secara langsung untuk alasan penegakan demokrasi lokal di daerah.

Penerapan pemilihan kepala daerah langsung ini menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah, tidak saja merancang, melakukan serta mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah namun pula diberi kewenangan menyusun seluruh tata cara yang berkaitan dengan tahap persiapan serta penerapan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.³¹

a. Perangkat Regulasi dan Kelembagaan Pemilihan Kepala Daerah

Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah tercermin dari perangkat regulasi serta kelembagaan. Tercatat sederet kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memuluskan pelaksanaan, seperti:³²

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pergantian atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, serta Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Pergantian atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, serta Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Peserta Pemilihan Kepala Daerah

³¹ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.

³² S H Thubany and others, *Pilkada Bima 2005: Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia* (Bina Swagiri, 2005).

UU No. 32 Tahun 2004 sudah memastikan jika peserta pilkada merupakan pasangan calon atau kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik (Pasal 59 UU 32/ 2004), tetapi dalam perkembangannya kemudian bersumber pada Putusan MK No 05/ PUU 05V/ 2007 bertepatan pada 23 Juli 2007 dimungkinkan terdapatnya calon perseorangan yang memenuhi persyaratan tertentu yang setelah itu dinormakan oleh UU No. 12 Tahun 2008.

Masalah yang wajib diperhatikan oleh penyelenggara pemilu merupakan permasalahan persyaratan calon, terutama terkait dengan dinamika putusan-putusan MK, antara lain: persyaratan tidak pernah dipidana sebab ancaman pidana 5 tahun ataupun lebih (Putusan MK No 4/ PUU- VII/ 2009 tanggal 24 Maret 2009), permasalahan kriteria terkait satu kali jabatan adalah separuh ataupun lebih masa jabatan 5 tahun (Putusan Nomor 22/ PUU- VII/ 2009), dan lain- lain.³³

Kecenderungan yang bisa terjadi diprediksi merupakan “trik” oleh kepala daerah yang sempat menjabat dua kali masa jabatan dengan menggunakan kelemahan undang-undang yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah dengan ada harapan “kesempatan” untuk menjadi kepala daerah lagi, apabila kepala daerahnya berhalangan. Terkait perihal ini menurut pandangan peneliti terdapatnya penyelundupan hukum yang wajib diwaspadai sehingga diperlukan pengaturan khusus terkait hal tersebut.

Hakikat pemilihan umum ialah metode serta sarana yang ada untuk rakyat dalam memastikan wakil-wakilnya yang hendak duduk di lembaga pemerintahan guna melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga dengan sendirinya ada bermacam-macam sistem pemilihan umum. Perbandingan sistem pemilihan umum ini banyak bergantung pada ukuran dan pemikiran yang ditujukan terhadap rakyat. *Pertama*, apakah rakyat dipandang selaku orang yang bebas untuk memastikan pilihannya serta sekaligus dapat mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat; *Kedua*, apakah rakyat hanya dilihat sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak untuk memastikan siapa wakilnya yang hendak duduk dalam lembaga pemerintahan serta ia tidak berhak mencalonkan diri selaku wakil rakyat.

³³ J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga menggali dan meneliti informasi dari peneliti-peneliti terdahulu sebagai bahan pertimbangan, baik dari segi kekurangan maupun kelebihan. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, maupun skripsi untuk mendapatkan referensi berkaitan dengan judul atau tema sebagai acuan landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang peneliti gunakan sebagai acuan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Rizki Rahman Harahap salah satu mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul “Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten (Studi Kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak, Tahun 2014)” hasil penelitian dari judul diatas ialah Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan yang dilakukan masyarakat kurang aktif dalam memberikan partisipasi politiknya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Malisa Ladini mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2016 dengan judul “Sikap Politik Petani dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus” hasil penelitian pada judul di atas ialah pendidikan politik pada masyarakat petani di pemilihan kepala daerah Kabupaten Semarang dapat dilakukan oleh para penyelenggara pemilu supaya masyarakat petani dapat memberikan hak suara kepada kandidat sesuai dengan pilihan mereka.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Wimmy Haliim dengan judul penelitian Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013. Hasil dari penelitian ini ialah mayoritas masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Malang tahun 2013 karena masyarakat sudah mulai sadar akan haknya sebagai warga negara dan masyarakat berharap melalui pemilu tersebut akan dapat melahirkan pimpinan yang nantinya mampu membawa kearah yang lebih baik.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Nela Ardila salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang berjudul Pengaruh Budaya Politik terhadap Perilaku Politik Masyarakat Studi Kasus Pilkada di Desa Bandarklipa Kecamatan Percut Sei Tuan. Hasil penelitiannya ialah setiap anggota masyarakat dari Desa Bandarklipa Kecamatan Percut Sei Tuan telah memiliki pandangan

maupun sikap politik yang positif yang membentuk perilaku politik dari masyarakat Desa Bandarklipa Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dari keempat penelitian terdahulu tersebut perilaku politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, daerah maupun desa dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Jika keempat penelitian tersebut lebih menggambarkan tentang perilaku politik masyarakat dari latar belakang masyarakat yang *heterogen* dan dipengaruhi oleh popularitas jalan kondisi sosial ekonomi dan adanya dampak *money politic* secara etimologis agar seseorang menggunakan hak politik mereka. Akibatnya angka partisipasi politik masyarakat menjadi tinggi. Penelitian yang dilakukan di Desa Panggung Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ini untuk melihat bagaimana perilaku politik masyarakat yang *homogen* secara ideologis maupun politis cenderung menghasilkan perilaku politik yang heterogen dalam menentukan pilihan mereka terhadap salah satu pilihan atau calon tertentu pada saat menjelang pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan penelitian tersebut juga sebagian besar hanya membahas mengenai perilaku dan masyarakat tetapi tidak membahas mengenai elite dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat. Untuk itu fokus penelitian peneliti adalah mengenai perilaku politik warga Nahdlatul Ulama Desa Panggung pada Pilkada Kabupaten Jepara tahun 2017.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Critical Point
1.	Rizki Rahman Harahap (2016)	Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten (Studi Kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak, Tahun 2014)	Pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan yang dilakukan masyarakat kurang aktif dalam memberikan partisipasi politiknya.	Kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang aktif dalam memberikan hak suara mereka kepada calon pemimpinnya guna tercapainya pembangunan daerah yang akan dicapai.
2.	Malisa Ladini (2016)	Sikap Politik Petani dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Dengan memberikan solusi dan pendidikan politik pada masyarakat petani pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Semarang, hal tersebut dapat membuat masyarakat memberikan hak suara kepada kandidat yang sesuai dengan pilihan mereka.	Terkait penelitian ini harus lebih mengutamakan dan melihat kepada aspirasi rakyat agar partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi lebih tinggi dan paham terhadap perilaku politik.

3.	<i>Wimmy Haliim (2017)</i>	Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Mayoritas masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang tahun 2013 karena masyarakat sadar akan haknya sebagai warga negara dan masyarakat berharap melalui pemilu tersebut akan dapat melahirkan pimpinan yang nantinya mampu membawa kearah yang lebih baik.	Masyarakat Kota Malang diharapkan mampu membedakan mana politik yang berdasarkan realitas sosial dan mana politik pencitraan terhadap pesta demokrasi.
4.	<i>Nela Ardila (2014)</i>	Pengaruh Budaya Politik terhadap Perilaku Politik Masyarakat Studi Kasus Pilkada di Desa Bandarklippa Kecamatan Percut Sei Tuan	Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif	Disimpulkan bahwa setiap anggota masyarakat telah memiliki pandangan maupun sikap politik yang positif yang membentuk perilaku politik dari masyarakat Desa Bandarklippa Kecamatan Percut Sei Tuan.	Sosialisasi politik dan dukungan dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi hal tersebut dapat menjadikan masyarakat menjadi pemilih yang partisipatif namun upaya kolektif dari para penyelenggara pilkada belum ada di daerah ini.

C. Kerangka Berfikir

Masa demokrasi saat ini pemilihan umum merupakan senjata untuk para calon penghuni panggung kekuasaan di negara ini untuk merebut hati para pemilih. Berbagai cara dicoba oleh aktor politik yang hendak bertarung di pemilihan umum untuk mencapai tujuan mereka termasuk pemakaian *money politic*. Pemahaman para pemilih sangat diperlukan dalam mencegah tiap aksi *money politic* yang dilakukan oleh para calon supaya pemilihan yang berlangsung nantinya bersifat jujur serta adil sesuai dengan asas-asas pemilihan umum.

Mengenai perilaku pemilih tersebut masih dalam tataran kerangka dasar pemikiran yang tetap berlandas pada faktor-faktor yang mempengaruhi ialah sosiologi, psikologi serta rasionalitas dan didukung oleh dua pendekatan atau mazhab besar ialah *mazhab columbia* serta *mazhab michigan* dan satu *mazhab* tambahan ialah *mazhab rasional*.

Pendekatan sosiologis menekankan peranan sosiologis selaku aspek pembentuk peranan seseorang. Pendekatan sosiologis mengedepankan pemikiran seseorang bersumber pada status sosial. Masyarakat secara menyeluruh ialah kelompok orang yang mempunyai pemahaman yang sangat kokoh. Pendekatan ini menerangkan kepribadian sosial serta menerangkan tentang pengelompokan sosial bersumber pada kelompok jenis kelamin, pekerjaan, usia, agama yang bisa membentuk perilaku politik pemilih di tiap wilayah sama halnya di Desa Panggung, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Tidak hanya pendekatan sosiologis terdapat pula pendekatan besar yang bisa menjelaskan perilaku pemilih. Pendekatan itu merupakan pendekatan psikologis. Terkait pendekatan psikologis menerangkan tentang bagaimana ciri seseorang terhadap isu-isu yang tersebar di dalam masyarakat sehingga membentuk pemikiran politik tertentu. Keterikatan seseorang terhadap partai politik tertentu serta kedekatan seseorang terhadap pemimpin pula ialah aspek yang bisa menjelaskan perilaku politik pemilih.

Kedua *mazhab* besar pada uraian sebelumnya pula ditemui *mazhab* yang baru bersamaan dengan berkembangnya riset tentang perilaku memilih ialah pendekatan rasional. Pada pendekatan ini memandang bahwa perilaku pemilih dalam memastikan pilihannya di pemilihan umum bersumber pada pertimbangan-pertimbangan rasional. Pendekatan rasional yang dikenalkan oleh Downs (1975) yang mengasumsikan jika pemilih pada dasarnya berperan secara rasional pada saat membuat pilihan di tempat pemungutan suara, tanpa memandang agama, jenis kelamin, status sosial, latar belakang, dan

sebagainya. Bersumber pada konteks pendekatan rasional, pemilih hendak menjatuhkan opsi terhadap partai politik ataupun kandidat tertentu pada saat pemilih merasa memperoleh manfaat yang sesuai dengan mengedepankan keuntungan setelahnya. Bila dilihat dari konteks kewilayahan, Desa Panggung ialah desa yang mayoritas penduduknya mempunyai pendidikan yang dirasa belum cukup. Sehingga untuk konteks pemilihan umum, rasionalitas mungkin belum menjadi pertimbangan utama dalam memastikan opsi. Untuk itu peneliti menggambarkan skema pemikirannya sebagai berikut:

Tabel 2.2. Kerangka Berfikir

